DPKP DIY INTENSIFKAN PEMANTAUAN DAN UJI LAB

Waspadai Penyakit pada Hewan Kurban

YOGYA (KR) - Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2024, Pemda DIY melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY mewaspadai sebaran penyakit pada hewan kurban.

Seperti kemungkinan munculnya potensi penyakit lumpy skin disease (LSD), penyakit mulut dan kuku (PMK), serta antraks yang sering muncul pada ternak. Upaya yang dilakukan di antaranya memantau kesehatan dan keamanan hewan di pasar maupun ternak mandiri dengan melibatkan petugas dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) UGM.

"Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah hewan ternak yang dijadikan kurban terserang penyakit. Selain memantau kesehatan dan keamanan hewan di pasar dan ternak mandiri, kami juga melibatkan FKH UGM. Untuk memastikan kesehatan hewan dari kabupaten/kota, kami juga melakukan uji lab untuk mengetahui status PMK dan antraks terhadap hewan yang keluar dan masuk DIY," kata Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Hery Sulistio Hermawan di Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (6/6).

Menurut Hery, petugas telah memberikan vaksin beberapa bulan sebelum hewan siap untuk dikurbankan. Sedangkan untuk hewan ternak dari DIY yang akan dibawa ke luar daerah untuk kebutuhan Idul Adha bisa mengakses vaksin gratis agar hewan ternak senantiasa terjamin kesehatannya. Berdasarkan data DPKP DIY, ketersediaan hewan kurban sapi potong di DIY sebanyak 36.345 ekor, sedangkan kebutuhannya 26.347 ekor, sehingga jumlahnya surplus 10.989 ekor. Kabupaten Gunungkidul dan Bantul jadi penyumbang paling besar masing-masing sebanyak 17.380 ekor dan 8.089 ekor.

"Vaksin gratis ini tidak hanya untuk hewan kurban di DIY. Tapi kalau ada peternak yang hewannya mau dijual ke luar DIY juga kami sediakan vaksin gratis," ujarnya.

Hery mengungkapkan, hewan ternak yang dipakai untuk perayaan kurban memang harus dipantau terus-menerus, untuk memastikan daging yang dikonsumsi warga memang benar-benar aman dan berasal dari ternak yang sehat. **(Ria)-d**

TRAVELOKA-KRATON YOGYAKARTA

Kerja Sama Digitalisasi Pariwisata

YOGYA (KR) - Kraton Yogyakarta dan kawasan sekitarnya berperan dalam peningkatan jumlah wisatawan ke Yogyakarta pada 2023 yang mencapai 46 persen YoY. Melalui inovasi digitalisasi dan kerja sama dengan Kraton Yogyakarta, Traveloka berupaya mendukung Pemerintah mengembangkan Yogyakarta sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas di Indonesia.

KR-Surya Adi Lesmana

Daya tarik Kraton Yogyakarta kini didukung digitalisasi objek wisata oleh Traveloka.

Iko Putera, CEO of Transport Traveloka mengatakan, Traveloka melihat potensi Yogyakarta untuk menjadi destinasi wisata pilihan domestik maupun turis global. "Data internal kami menunjukkan peningkatan pencarian penerbangan ke Yogya hingga dua kali lipat, dan lebih dua kali lipat untuk akomodasi di periode libur Waisak tahun ini, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya," paparnya, Kamis (6/6).

"Kolaborasi Traveloka dan Kraton Yogyakarta melalui digitalisasi objek wisata, akan memberikan pilihan wisata budaya yang lebih beragam bagi wisatawan, dan tentunya semakin mendorong Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata global," tambah Iko.

GKR Bendara, Pengageng KHP Nitya Budaya Kraton Yogyakarta menyebut, kerja sama ini sejalan dengan upaya memberi pengalaman terbaik bagi wisatawan melalui program menarik yang diadakan setiap minggu, seperti pameran budaya, pertunjukan seni tradisional, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. **(Bro/Sal)-d**

PPIH

Sambungan hal 1

saja sudah sangat sempit dan padat," sebut Subhan Cholid.

Tahun 2024, Mina Jadid tidak lagi ditempati jemaah haji Indonesia, sehingga, 213.320 jemaah dan 2.747 petugas haji akan menempati seluruh area Muzdalifah. Padahal, tahun ini juga ada pembangunan toilet yang mengambil tempat di Muzdalifah seluas 20.000 meter persegi. Dengan demikian, ruang yang tersedia untuk setiap jemaah jika semuanya ditempatkan di Muzdalifah, 82.350 - 20.000 = 62.350 meter persegi/213.320 = 0,29 meter persegi.

"Tempat atau *space* di Muzdalifah menjadi semakin sempit dan ini berpotensi kepadatan luar biasa yang jika dibiarkan bisa membahayakan jemaah. Oleh sebab itu kita akan menerapkan skema murur saat mabit di Muzdalifah," jelas Subhan.

Hal ini, kata Subhan, sejalan dengan hasil musyawarah Pengurus Besar Harian Syuriyah NU yang memutuskan, kepadatan jemaah di area Muzdalifah dapat dijadikan alasan kuat sebagai uzur untuk dapat meninggalkan mabit di Muzdalifah, sehingga hajinya sah dan tidak terkena kewajiban membayar dam. Sebab, kondisi jemaah yang berdesakan borpotensi menimbulkan *mudharat/masyaqqah* dan mengancam keselamatan jiwa jemaah. "Menjaga keselamatan jiwa (*hifdu an-nafs*) pada saat jemaah haji saling berdesakan termasuk uzur untuk meninggalkan mabit di Muzdalifah," ujar Subhan mengutip salah satu kesimpulan musyawarah Syuriah PBNU.

Subhan merinci, pergerakan jemaah haji Indonesia 1445 H/2024 M dari Arafah akan dibagi dalam dua skema, yaitu murur dan normal. Pergerakan dengan skema murur menyasar 25% dari jumlah jemaah dan petugas haji. Totalnya diperkirakan mencapai 55.000 orang. **(Jon/Ati)-f**

TNI

Sambungan hal 1

stabilitas di zona konflik. "Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan, serta meningkatkan perdamaian dan keamanan," tambah Jenderal Agus.

Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, ujar Panglima TNI, masih menunggu resolusi dan mandat dari PBB terlebih dulu. Meski demikian, ia menyebut, Mabes TNI telah menyiapkan pasukan dengan ketentuan *pledging* (komitmen) ke PBB.

"Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran tingkat atau level 1. Apabila mandat PBB tentang pergelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2," tuturnya. **(Ant/Obi)-d**

Indonesia

Sambungan hal 1

Pemuncak klasemen sementara Grup F saat ini tetap ditempati Irak dengan nilai sempurna, 15 hasil 5 laga yang seluruhnya berakhir dengan kemenangan bagi tim berjuluk 'Singa Mesopotamia' tersebut.

Meski gagal meraih poin di laga kelima pada penyisihan Grup F, namun peluang Indonesia untuk lolos masih sangat terbuka asalkan mampu meraih kemenangan saat bertemu Filipina di tempat yang sama, Selasa (11/6). Kemenangan atas Filipina di laga pamungkas Grup F akan membawa tim besutan pelatih Shin Tae-yong mengemas 10 poin dan berhak lolos ke fase selanjutnya sebagai *runner up* grup, di bawah Irak.

Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan, banyaknya kesalahan yang dilakukan para pemainnya menjadi salah satu hal yang membuat hasil laga ini tidak berpihak pada Indonesia. "Para pemain sudah bekerja keras tetapi banyak hal yang disayangkan. Walaupun kami bermain baik tetapi karena kesalahan sendiri kami kalah," terangnya.

Dalam laga kontra Irak, Indonesia turun dengan komposisi sedikit berbeda dibandingkan laga-laga lainnya. Tercatat delapan pemain naturalisasi, yakni Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, Shayne Pattynama, Rafael Struick, dan Ragnar Oratmangoen, menemani trio Ernando Ari, Rizky Ridho, dan Marselino Ferdinan sebagai 11 pemain pertama.

Formasi tersebut membuat permainan kedua kesebelasan sedikit berimbang dan saling menekan pertahanan lawan. Pada menit ke-16, Irak bahkan sempat mencetak gol melalui Ibrahim Bayesh, namun gol tersebut dianulir wasit Shaun Evan. Empat menit berselang, giliran Indonesia menekan pertahanan Irak lewat aksi individual Rafael Struick.

Meski sejumlah peluang datang silih berganti dari kedua kubu, namun hingga pertandingan babak pertama berakhir, tak ada gol yang tercipta. Skor imbang ini langsung berubah di awal babak kedua saat Aymen Hussein mencetak gol pembuka bagi tim tamu lewat tendangan penalti di menit ke-54. Penalti diberikan wasit usai Justin Hubner melakukan *hands ball* di kotak penalti.

Lima menit berselang dari gol Irak, petaka kembali menghampiri tuan rumah setelah Jordi Amat menerima kartu merah usai melanggar Youssef Wali dengan keras tepat di depan kotak penalti Indonesia. Hanya memiliki 10 pemain membuat pelatih Indonesia, Shin Tae-yong melakukan perubahan dengan memasukkan Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Ivar Jenner menggantikan Sandy Walsh, Thom Haye, dan Shayne Pattynama.

Pergantian ini tak banyak membantu dan di menit ke 72, pelanggaran yang dilakukan Ernando Ari terhadap Ali Jassim di dalam kotak penali kembali berbuah penalti. Beruntung, sepakan Aymen Hussein melambung di atas gawang Indonesia.

Memasuki menit ke-88, kesalahan yang dilakukan Ernando Ari saat menerima *back pass* dari Asnawi Mangkualam berbuah gol kedua bagi Irak di laga ini. Bola yang coba ditahan Ernando di kotak penalti, mampu direbut Ali Jassim yang dengan mudah menceploskan bola ke dalam gawang Indonesia. Skor 2-0 untuk tim besutan pelatih Jesus Casas tak berubah hingga peluit akhir ditiup wasit. **(Hit)-f**

Bursa

Sambungan hal 1

memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam mendukung ekonomi hijau adalah mempersiapkan perangkat regulasi terkait pasar karbon dengan menyusun tata laksana nilai ekonomi karbon, khususnya dalam konteks perdagangan karbon. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Perangkat hukum perdagangan karbon tersebut di atas telah mengamanatkan penyelenggara perdagangan di bidang pasar modal untuk menyelenggarakan perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Bursa karbon adalah pasar tempat perdagangan izin emisi karbon dan kredit karbon. Konsepnya muncul sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi GRK dan mengatasi perubahan iklim. Bursa karbon bertujuan untuk menciptakan insentif bagi perusahaan dan negara untuk mengurangi emisi GRK dengan cara menyediakan mekanisme untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon (https://umsu.ac.id).

Penyelenggaraan bursa karbon dapat mendorong pengurangan emisi GRK.

Melalui batasan emisi dan perdagangan izin atau kredit karbon, perusahaan dan sektor-sektor tertentu memiliki insentif untuk mencari cara-cara inovatif melalui investasi teknologi ramah lingkungan. Kebijakan ini memberikan kontribusi dalam mengurangi efek GRK terhadap perubahan iklim.

Penyelenggaraan bursa karbon di Indonesia akan menciptakan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan keuangan dari negara-negara maju melalui investasi teknologi ramah lingkungan.

Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon pada tanggal 26 September 2023 melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon. Beberapa emiten yang memiliki bisnis terkait penyerapan emisi karbon yang dapat dihitung sebagai kredit karbon telah memanen keuntungan sejak masuk di IDX Carbon (https://www.cnbcindonesia.com). PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang khusus mengembangkan energi panas bumi telah mencetak pendapatan dari kredit karbon sejak 2023 sebesar US$747.000 atau setara Rp11,13 miliar (kurs Rp14.900). PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) telah mencatatkan pendapatan dari hasil penjualan kredit karbon sebesar US$3,6 juta atau setara Rp53,64 miliar.

Bursa karbon akan mempercepat capaian pembangunan ekonomi inklusif.

Tidak hanya mengejar pertumbuhan (pro-growth), namun juga penyerapan tenaga kerja (pro-job), pengurangan kemiskinan (pro-poor), pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan (pro-equality), dan peduli lingkungan (pro-environment).

(Penulis adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Yogyakarta, dan Kafegama Pengda DIY)-f

Massa

Sambungan hal 1

Said berharap, Pemerintah tidak menambah besaran potongan gaji buruh melalui Tapera.

Said mengatakan, Partai Buruh akan mengajukan gugatan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera jika aspirasi mereka dalam unjukrasa ini tidak didengar.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Program Tapera perlu disosialisasikan lebih lanjut ke masyarakat. "Sebetulnya itu dari UU yang lahir tahun 2016, kemudian kami dengan Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust, sehingga kita undur ini sampai tahun 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa gesa?" ujar Basuki di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, harus diketahui bahwa APBN sampai sekarang sudah Rp 105 triliun yang dikucurkan untuk program-program bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subdidi Selisih Bunga. "Kalau yang punya rumah sebenarnya itu sebagai penabung, tapi bunganya lebih besar dari deposito kalau dia mau ambil," katanya. **(Ant/San)-f**

Muhammadiyah

Sambungan hal 1

keterangan tertulis kepada awak media di Jakarta, Rabu (5/6) malam.

Anwar menegaskan, Muhammadiyah memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Oleh sebab itu, Muhammadiyah terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya. Dengan begitu, Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada, terutama ketika dunia perbankan syariah tersebut berhubungan dengan Muhammadiyah.

"Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya. Termasuk dalam hal yang terkait dengan dunia perbankan, terutama menyangkut tentang penempatan dana dan juga pembiayaan yang diterimanya," kata Anwar.

Keputusan Muhammadiyah untuk mengalihkan dananya dari BSI ke beberapa bank syariah lain tersebut tertuang dalam Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024. Terkait keputusan Muhammadiyah tersebut, BSI juga telah memberikan tanggapannya.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, BSI senantiasa berkomitmen memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip adil, seimbang, dan bermanfaat (maslahat) sesuai syariat Islam. Perseroan juga akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"Terkait pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat. Terlebih bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa," katanya. **(Ant/Has)-d**

Pengadu

Sambungan hal 1

Ketua KPU RI, dan yang lebih penting lagi ini korban dua kali dia datang sendiri ya, dan dia bolak-balik Jakarta-Belanda cuman untuk itu," katanya.

Aristo juga menginginkan teradu diberhentikan oleh DKPP. "Tadi dikasih kesempatan *closing statement* (pernyataan penutup), kami minta untuk petitumnya diberhentikan dari jabatan Ketua KPU RI juga anggota KPU RI," tandasnya.

Dalam pernyataan penutup tersebut, Aristo juga mengatakan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari secara jelas menyalahgunakan jabatan dan fasilitas yang didapatkan. "Majelis DKPP yang terhormat sudah memeriksa, sudah tanya langsung, dan sudah bisa mencium kejanggalannya. Jadi, jangan sampai putusannya *melempem*," ujarnya.

Oleh sebab itu, Aristo mengharapkan DKPP dapat menjatuhkan putusan yang berpihak kepada korban. Ia juga optimistis dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh DKPP nanti. "Optimistis karena buktinya sudah banyak sekali. Kalau sampai ternyata putusannya tidak, saya enggak tahu lagi, ya, kalau putusannya tidak berpihak kepada korban, ya, saya enggak tahu lagi. Nanti kita lihat," katanya.

Kuasa hukum korban lainnya, Maria Dianita Prosperianti, mengatakan bahwa DKPP bersikap positif dalam dua persidangan kasus tersebut. "Sudah diperiksa ya semuanya, semuanya sudah diserahkan, dan memang DKPP kami melihat ada positif di sini. Berperspektif kepada korban, kepada perempuan, dan kami harap memang putusannya seperti itu," tambahnya. **(Ant/Has)-d**

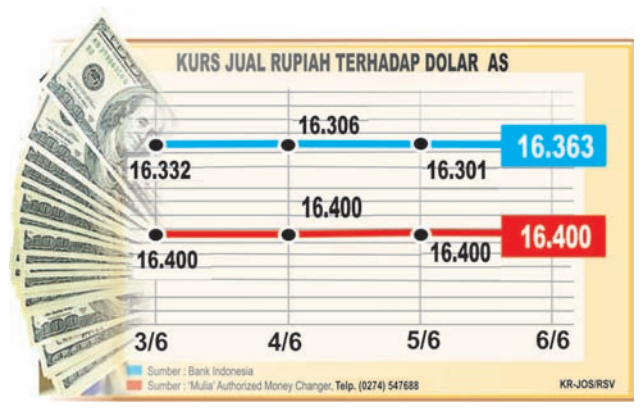

Prakiraan Cuaca — Jumat, 7 Juni 2024

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak yang Terlambat Melaporkan SPT Tahunan

Alfriadi Dwi Atmoko, SE MSi Ak CA ACPA
Dosen Akuntansi
Universitas Amikom Yogyakarta

HAI pembaca Kedaulatan Rakyat yang kreatif, kali ini saya akan membahas tentang mekanisme bagaimana tata cara perpanjangan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) yang terlambat melaporkan SPT Tahunannya. Berdasarkan ketentuan perpajakan pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 Ayat 3 dijelaskan bahwa pelaporan SPT Masa akan berakhir paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi (OP) berakhir paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret) dan WP Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April). Apabila pelaporan melewati batas akhir yang telah ditentukan maka ada sanksi yang harus ditanggung oleh masing-masing WP. Sanksi bagi WP OP akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 100.000 dan bagi WP Badan sanksi administrasinya Rp 1.000.000. Nah berikut prosedur apabila WP ingin mengajukan permohonan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 PER-21/PJ/2009, Adapun prosedur permohonan penundaan penyampaian SPT yaitu pertama membuat pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara tertulis, permohonan ini disampaikan dalam bentuk formular yang sudah sesuai (hardcopy) atau dalam bentuk elektronik (e-SPT) beserta lampiran dokumen yang diminta dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Kedua formular harus ditandatangani oleh WP atau pihak kuasa yang ditunjuk, jika pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dibuat oleh kuasa WP, maka wajib dilampirkan surat kuasa. Ketiga WP harus menjelaskan alasan mengapa memerlukan kelonggaran waktu.

Berdasarkan Pasal 5 PER-21/PJ/2009 disebutkan bahwa pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dapat disampaikan melalui beberapa cara yaitu, secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dengan cara lain. Dengan cara lain yang dimaksud adalah dapat melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, e-Filing melalui ASP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengajuan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan ini tidak dapat dipastikan dapat diterima, karena Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan diputuskan oleh DJP. Keputusan ini akan diproses dan diberikan kepada WP hasilnya paling lambat tujuh hari kerja setelah surat permohonan diterima dalam kondisi lengkap. Apabila kepala KPP tidak memberikan pemberitahuannya kepada WP dalam jangka waktu yang ditentukan maka pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dianggap diterima. Jangka waktu paling lama untuk pemberitahuan SPT Tahunan apabila diterima permohonan perpanjangannya adalah 31 Mei bagi WP Op dan 30 Juni bagi WP Badan.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park